

KOORDINASI PENERTIBAN INSTALASI PEMBANGUNAN AIR LIMBAH PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG

COORDINATION OF INSTALLATION OF FACTORY WASTE WATER DEVELOPMENT IN EAST KAWASAN BANDUNG REGENCY

Tati Sarihati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
sarihati.tati@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel koordinasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung”.

Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori koordinasi dari Mc Farland dalam Handyaningrat (1996:124-125), berdasarkan dimensi koordinasi melalui motivasi, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi. Adapun untuk variabel efektivitas digunakan pendekatan teori dari Goggin, et.al dalam Soemaryadi (2005: 111-113) yakni dimensi prosedural, tujuan, monitoring & evaluasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (*explanatory survai method*) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*Simple Random Sampling*). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Kata Kunci: efektif, koordinasi, IPAL

ABSTRACT

The background of this research was uneffectively in due order of the developing instalation of the solid waste industry in the east Bandung regency. I assumed that the cause had been influenced by the coordination of BPLD with the other institution who had responsibility. According to the case, the problem formulation was: "How much was the influence of coordination towards the due order of effectiveness of the developing instalation of the solid waste industry in the east Bandung regency".

The analysis of research case was taken by using coordination theory approach of Mc Farland in Handyaningrat (1966:115) according to the dimentions of coordination by authority; coordination by concencus; coordination by guidelation work; coordination by forum and coordination by conference. Beside, to determine variables of the effectiveness of

the due order of the developing instalation of the solid waste industry in the east Bandung regency, approach theory of Goggin was used-the dimensions of the procedural, goals and monitoring and evaluation.

Method used in the research was explanatory survey method, and the source of data collection was taken by using literature study and field study through questionnaire. Observation and interview. The sample technique was random sampling. Data analysis technique used in this research was simple linear regression.

According to the data processing, the result of the research showed there were a significant and positive influence between the coordination by the BPLD to the effectiveness of the developing instalation of the solid waste industry in the east Bandung regency. Besides such variables, there was other variables which influenced to the effectiveness of the developing instalation of the solid waste industry in the east Bandung regency.

Keywords: *effective, coordination, IPAL*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini pencemaran lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Selain itu, pencemaran industri juga berdampak buruk bagi lahan pertanian produktif dan dapat menurunkan kualitas tanah maupun kualitas produk pertanian. Dampak pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomis, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian juga bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Wilayah Timur Kabupaten Bandung yakni Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung dan Majalaya dan Solokan Jeruk, secara historis

merupakan sentra lumbung padi untuk Kabupaten Bandung. Namun, akhir-akhir ini petani di daerah tersebut banyak yang mengeluh akibat lahannya tidak dapat ditanami padi lagi. Hasil gabah menurun, ikan dan ternak banyak yang mati akibat mengkonsumsi air saluran atau sungai. Tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya wilayah tersebut menjadi daerah industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya biaya-biaya sosial yang akan ditanggung dalam jangka waktu yang lama. Misalnya biaya sosial dikarenakan logam berat dalam jumlah yang berlebih akan bersifat racun. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh akan terakumulasi dalam darah dan lemak yang apabila melebihi ambang batas dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari BPLH jumlah industri di kawasan Timur Kabupaten Bandung dari kelima Kecamatan tersebut terdapat 105 industri tekstil berskala besar dan kecil. Kawasan Majalaya seperti kita ketahui adalah merupakan kawasan sentral Industri tekstil yang telah terbukti dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah, dimana industri tekstil tersebut dengan

nyata-nyata mampu membuka peluang usaha dan peluang kerja bagi ribuan orang tidak dipungkiri bahwa industri tekstil merupakan sektor penting di dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintah pusat.

Dampak dari limbah industri yang terjadi di Kecamatan Majalaya Kemiskinan membuat warga sekitar Sungai Citarum tak punya pilihan kecuali menggunakan air yang tercemar. Maka, penyakit pun membayangi hidup mereka. Sungai Citarum yang melintasi Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selama bertahun-tahun menjadi tempat buangan limbah pabrik tekstil. Melalui gorong-gorongnya, pabrik-pabrik itu meluncurkan limbah ke sungai yang sekaligus menjadi sumber air warga setempat.

Masyarakat yang bermukim di Desa Ciwalengke, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya mengeluhkan gatal-gatal di tubuhnya. Penyakit gatal-gatal itu dirasakan merata oleh hampir 1.200 keluarga di Kampung Ciwalengke. Selama puluhan tahun, warga di sana menggunakan air dari Sungai Sasak Benjol, anak Sungai Citarum yang melewati Majalaya. Kampung di Desa tersebut sangat padat. Rumah warga yang rata-rata berukuran 15 meter persegi berimpitan dalam gang yang lebarnya sekitar 1 meter. Di kanan-kiri kampung adalah perusahaan tekstil yang setiap hari menghasilkan limbah beracun. Limbah yang sama tak terhindarkan ikut dikonsumsi.

Sedikitnya 16 pabrik menggelontorkan limbah kimia langsung ke sungai. Hal itu biasanya dilakukan pada malam hari untuk mengelabui pemantau. Apabila satu pabrik mengeluarkan 400 meter kubik saja per hari, ada 6.400 meter kubik limbah di Sukamaju, belum lagi di kawasan industri lain di Kabupaten Bandung. Uji kualitas air yang dilakukan Badan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat tahun 2012 menyatakan kandungan chemical oxygen demand (COD) terbesar di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum ditemukan di Majalaya, tepatnya di sekitar Jembatan Koyod. Pada Oktober 2012, kadar COD mencapai 420 miligram (mg) per liter air, jauh di atas ambang batas normal 25 mg per liter.

Di Kecamatan Rancaekek aspek pencemaran air akibat limbah industri yang langsung dibuang ke badan air atau bahkan ada yang dibuang ke dalam tanah. Pelanggaran tersebut ditemukan, ketika BPLHD Jawa Barat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah industri. Selain itu, laporan dari masyarakat mengenai banyaknya pencemaran lingkungan yang dilakukan beberapa perusahaan di lingkungan warga tersebut. Permasalahan limbah ini sangat berpengaruh besar untuk masyarakat Rancaekek, terutama petani. Akibat limbah, hasil pertanian jadi berkurang drastis dari tahun ke tahun

Peninjauan dan klarifikasi izin pabrik yang beroperasi di Kecamatan Rancaekek-Cicalengka harus dilakukan. Seperti diketahui, sedikitnya 22 pabrik yang ada di sekitar wilayah Rancaekek-Cicalengka masuk ke Sungai Cikijing tanpa ada pengolahan terlebih dulu, persoalan itu juga mengakibatkan lebih dari 400 hektare lahan pertanian di empat desa di Kec. Rancaekek hingga saat ini tercemar limbah cair, yaitu Desa Jelegong 150 ha (milik 838 orang), Linggar 109 ha (milik 236 orang), Sukamulya 40 ha, dan Desa Bojongloa seluas 118 ha. Akibatnya, produksi padi di wilayah itu mengalami penurunan. Tingkat produksi gabah kering panen (GKP), saat ini antara 0,5-0,6 ton/ha. Padahal dalam kondisi normal dan tidak tercemar limbah cair, produksi GKP berkisar 6,5 – 8,4 ton/ha. Hal itu menyebabkan kerugian material rata-

rata Rp 2,2 juta/ton. Sungai-sungai juga telah tercemar beberapa logam berat dan menyebabkan ikan-ikan mati. Air tanah di kawasan industri Cicalengka juga diduga sudah tercemar logam berat, Merkuri dan Krom.

Dari data buang limbah saat ini di Cicalengka terungkap sebanyak 40 ton limbah industri. Dan rata-rata limbah itu dibuang melalui air sungai yang hilirnya menuju Sungai Citarum. Selain itu juga, perusahaan yang rata-rata bergerak di bidang garmen itu telah menyalahgunakan pengelolaan air. Perusahaan-perusahaan itu mengambil air langsung dari dalam tanah. Terbanyak dimiliki oleh Perusahaan Kahatex sebanyak 33 air sumur. Kondisinya sudah sangat rawan. secara kasat mata perubahan akibat pencemaran tersebut juga dapat dilihat antara lain, jalur tol Rancaekek-Cicalengka sudah terjadi amblesan sedalam 4 meter.

Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan masalah pembuangan air limbah ke sumber air, pada kenyataannya terdapat beberapa industri yang terletak di daerah Rancaekek dan Majalaya, Kabupaten Bandung, diduga tidak mengoperasikan IPAL secara benar. Industri tersebut membuang limbahnya secara langsung ke sungai tanpa diproses di IPAL. Dari beberapa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, sering industri-industri hanya menjalankan IPAL-nya ketika ada pemeriksaan. Bahkan, ketika hujan turun, dimanfaatkan oleh industri untuk membuang limbahnya sehingga air pun berwarna hitam pekat.

Para pengusaha industri di kawasan Timur kabupaten Bandung saat ini lebih terfokus pada upaya untuk melakukan efisiensi seiring makin melambungnya biaya produksi, belanja pegawai hingga ongkos energi. Sehingga mau tak mau akan menomorduakan persoalan

pembuangan limbahnya.

Beberapa industri (perusahaan) yang menghasilkan limbah (terutama limbah cair), sering mengeluh jika harus mengolah air limbahnya terlebih dahulu. Alasannya yang terkesan klasik adalah kalau pengolahan air limbah (IPAL) itu memerlukan biaya tidak sedikit. Sehingga tidak mengherankan, walaupun perusahaan tersebut telah memiliki IPAL, tetapi kadangkala sering kucing-kucingan dengan pemerintah dalam pemanfaatan dan pengoperasian IPAL-nya.

Menyikapi permasalahan di atas, maka sudah saatnya para penghasil limbah dalam melakukan pengelolaan limbahnya, harus segera menerapkan program minimisasi limbah terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengolahan limbah melalui IPAL. Kuncinya ada pada kesadaran dan moralitas para pengusaha itu sendiri. Pengawasan terhadap pengolahan limbah industri makin kendur di tengah hiruk-pikuk upaya industri untuk mempertahankan produktivitasnya. Hal itu tidak boleh terjadi mengingat dampak buruk yang ditimbulkan limbah bagi kehidupan manusia.

Langkah awal Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi masalah pencemaran yang disebabkan oleh industri, secara teknis operasional berkaitan dengan teknis pengendalian pembuangan limbah ke air menjadi tanggung jawab BPLH, bekerjasama dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPPM). Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE) instansi yang terlibat dalam pengendalian pencemaran air, khususnya dalam verifikasi lapangan atas permohonan izin pembuangan air limbah. Dasar hukum adalah pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuatan Air Limbah ke Sumber Air. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan mengeluarkan

izin bagi industri.

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat bahwa penertiban IPAL di Kawasan Timur Kabupaten Bandung

belum optimal. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam data tabel 1.

Tabel 1
Data Industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Industri	Taat IPAL	Tidak Taat IPAL
1	2011	1. Rancaekek	16	6	10
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	4	2	2
		4. Majalaya	56	50	6
		5. Solokanjeruk	1	1	0
		Jumlah	80	61	19
2	2012	1. Rancaekek	22	7	15
		2. Cicalengka	3	2	1
		3. Cikancung	8	2	6
		4. Majalaya	70	58	12
		5. Solokanjeruk	2	1	1
		Jumlah	105	70	35

Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2016

Berdasarkan tabel 1. di atas, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir yakni dari tahun 2011 s.d. 2012 perusahaan industri di Kawasan Timur Kabupaten Bandung dalam penertiban instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum efektif. Dimana dari beberapa jumlah industri di 5 (lima) kecamatan yang berada di kawasan Timur Kabupaten Bandung masih banyak yang tidak taat IPAL.

Pencemaran terhadap air biasanya diakibatkan oleh perusahaan yang membuang limbah cairnya masih di atas rata-rata Baku Mutu yang telah ditetapkan. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Akibat Instalasi Pengolahan Air Limbah yang pengoperasiannya kurang optimal, sehubungan biaya untuk mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah cukup tinggi.
2. Masih ditemukan perusahaan yang membuang limbah cairnya tanpa diolah

terlebih dahulu oleh Instalasi Pengolahan Air Limbah secara diam-diam.

3. Ada beberapa industri yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, peneliti menduga bahwa belum efektifnya penertiban Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pabrik di Kawasan Timur Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menghubungkannya dengan variabel koordinasi oleh BPLH dengan instansi terkait dan berbagai komponen program. Koordinasi yang berlangsung secara sinergis diantara para badan pelaksana sangat dibutuhkan, bersamaan dengan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif juga pertukaran informasi diantara badan pelaksana, dan stakeholders lainnya.

2. Tinjauan Teoritis

Pengertian mengenai koordinasi dikemukakan Ndraha (2003:290) sebagai berikut:

“Koordinasi berasal dari kata *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*, sedangkan dilihat dari segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu sehingga disatu sisi posisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain”.

Selanjutnya, Ndraha (2003:290) menjelaskan bahwa jika dilihat dari sudut normatif koordinasi dapat diartikan sebagai :”Kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyalurkan dan menyeimbangkan kegiatan kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan”. Adapun dilihat dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, bahwa koordinasi sebagai berikut :”Proses penyatupaduan sasaran-sasaran dalam kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi”. Dengan melaksanakan syarat syarat koordinasi tersebut, diharapkan sasaran yang diinginkan oleh organisasi dapat dicapai seoptimal mungkin. Demikian halnya dengan sasaran pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan.

adalah usaha penyatupaduan unit-unit dalam organisasi agar setiap tindakan atau upaya setiap unit-unit terdapat hubungan yang serasi dan mengarah kepada tujuan organisasi.

Koordinasi adalah merupakan pengetahuan dan keterampilan melalui komunikasi, saling pengertian, hubungan manusia dan kerjasama, besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Pentingnya koordinasi adalah karena adanya ketergantungan antara unit yang satu dengan unit yang lain dalam proses pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Suganda (1992:22) mengemukakan pengertian koordinasi sebagai berikut: “koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah kepada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisiensi”. Sedangkan Sukarno (1992:67) mengemukakan: “koordinasi ini merupakan suatu tindakan lanjutan daripada asas-asas organisasi lainnya seperti penetapan tujuan, pembagian pekerjaan, penentuan tenaga kerja, penetapan wewenang dan tanggung jawab atau pengawasan”

Stoner dalam suganda (1992:12) mengemukakan pengertian Mc Farland dalam Handyaningrat (1996 : 124-125), mengemukakan metode-metode koordinasi, sebagai berikut:

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui consensus
 - Konsensus melalui sistem timbal balik
 - Konsensus melalui ide
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
4. Koordinasi melalui forum
5. Koordinasi melalui konferensi

Keterpaduan koordinasi yang dilakukan oleh BPLH Kabupaten

Bandung tentunya akan memberi dampak yang positif terhadap hasil kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan metode-metode dalam pelaksanaan koordinasi, diharapkan efektivitas penertiban IPAL pabrik oleh BPLH Kabupaten Bandung dapat berjalan secara maksimal.

Konsep efektivitas bila dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, memiliki makna yang berbeda. Steers (1985:205) mengemukakan pandangannya sebagai berikut; "Efektivitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika di lihat dari sudut sejauhmana organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional".

Gibson, et.al (1997:38) mengemukakan ; "Efektivitas berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, apakah hal ini bersifat teoritis maupun praktis". Perbedaan dalam artinya menggambarkan satu ketaatan terhadap pendekatan tujuan, pendekatan teori sistem atau pendekatan *multi constituency*.

Pengertian lain dari efektivitas menurut Dunn (2003 ; 498) adalah "Suatu kriteria untuk menseleksi alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi".

Sedangkan efektivitas menurut E. Kast dalam Sugiyono (2003 ;23) adalah "Efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai."

Dengan demikian efektivitas

sangat ditentukan oleh adanya sumber daya yang baik, terutama menyangkut sumber daya manusia, yaitu di tingkat manajerial dan juga pelaksana. Di samping itu, berbagai sumber daya pendukung seperti organisasi dan fasilitas pendukung juga merupakan faktor yang penting dalam mendukung pencapaian efektivitas yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sementara Goggin, et.al dalam Soemaryadi (2005: 111-113) mengatakan efektivitas dapat diukur melalui tiga dimensi, yaitu sebagai berikut :

1. *Prosedural (Compliance)*, adalah semua aktivitas implementasi yang dijalankan oleh implementor (Pelaksana) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan autoritatif dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. *Tujuan/Hasil (Result)*, yaitu menyangkut tujuan dan persoalan dasar (substansial) yang hendak dipecahkan melalui kebijaksanaan (Problem solving oriented)
3. Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (*monitoring*) dan *Evaluasi*. Sebagai upaya untuk memantau secara berkala agar efektivitas berjalan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan, karena dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesegera mungkin. Upaya ini dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui laporan-laporan atau catatan tertulis.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori (*explanatory survai method*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode korelasional dengan tujuan untuk mencari pengaruh di antara variabel-variabel yang diteliti,

pengaruh itu dapat bersifat positif atau negatif (Rahmat, 2004: 27).

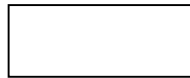
Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan masalah masalah yang dihadapi dalam kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap pemberdayaan organisasi kepemudaan dan olahraga di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Populasi sasaran (*target population*) dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terkait dengan masalah yang terdiri dari Unsur aparat PPL dan Pengusaha Industri di Kabupaten Bandung.

Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling* dengan ukuran sampel sebanyak 61 orang.

Teknik analisis yang digunakan analisis statistik regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$



Keterangan:

a = Nilai konstan

b = Koefisien Regresi

X = Nilai variabel bebas

Y = Nilai variabel terikat/tergantung

n = Jumlah responden.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh koordinasi terhadap efektivitas penertiban Instalasi Pembangunan Air Limbah (IPAL) pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung adalah sebesar 62,5%. Hal ini menunjukkan adanya variabel lain diluar koordinasi yang memberikan kontribusi terhadap efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung sebesar 37,5%.

Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada efektivitas penertiban IPAL pabrik di kawasan Timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan dengan institusi maupun para pelaku industri sebagai sasaran program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi koordinasi melalui kewenangan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan belum optimal dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan Mc. Farland dalam Handyaningrat (1996 : 124-125) bahwa penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksanannya koordinasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BPLH Kabupaten Bandung diketahui bahwa terdapat banyak kendala untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dalam penertiban IPAL pabrik. Kendala yang dihadapi antara lain bahwa institusi yang terlibat tidak bersifat seragam atau mempunyai keanekaragaman jenis dan fungsi. Permasalahan penertiban IPAL pabrik pada institusi lain diluar BPLHD hanya merupakan sub system dari seluruh system pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan sehingga tidak mendapatkan perhatian yang terfokus.

Observasi yang peneliti lakukan sejalan dengan pernyataan tersebut dimana ditemukan gejala gejala yang menunjukkan kurang padunya institusi yang terkait dengan masalah penertiban IPAL pabrik. Terkesan bahwa institusi yang terlibat bekerja sendiri sendiri sesuai tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.

Pada konteks koordinasi melalui pedoman kerja, hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan dimensi tersebut. Pedoman kerja atau petunjuk kerja, seperti dikemukakan Mc Farland dalam Handayani (1996:124-125), merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi pemerintah yang terkait dalam hubungan kerja ini.

Menurut keterangan salah seorang pejabat BPLHD Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan berbagai upaya perbaikan kondisi sanitasi di Kabupaten Bandung. Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-607/Kep/Bangda/2012 tentang Penetapan Kabupaten atau Kota Sebagai Peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013, Kabupaten Bandung resmi tergabung dalam Program PPSP Tahun 2013.

Dengan status kepesertaan tersebut, maka sesuai alur hirarki dalam Program PPSP, Pemerintah Kabupaten Bandung diwajibkan untuk membentuk kelompok kerja khusus yang dapat berperan sebagai koordinator, advisor dan fasilitator pada Program PPSP Kabupaten Bandung tahun 2013. Sebagai koordinator dalam hal ini memiliki pengertian bahwa selama kegiatan PPSP kelompok kerja akan berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Bandung.

Sebagai tahap awal untuk menciptakan perbaikan kondisi sanitasi

di Kabupaten Bandung, termasuk kedalamnya pengelolaan IPAL, Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Bandung melakukan pemetaan kondisi sanitasi eksisting. Pemetaan tersebut dianggap perlu dan penting dilakukan sebagai patokan untuk menentukan parameter sejauh mana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi Kabupaten Bandung sehingga dapat sesuai target yang ditetapkan. Baik itu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP) Jawa Barat, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun dengan target MDG di sektor sanitasi.

Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat digunakan sebagai cara mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah tim kerja, panitia suatu tugas dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit atau organisasi yang bersangkutan.

Dimensi koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, akan tetapi digunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian

seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat tercegah persepsi perkotak-kotak tindakan sikap dan perilaku anggota organisasi. Dalam pelaksanaannya menurut salah seorang kepala Bagian BPLH Kabupaten Bandung tidak mudah untuk menyatukan visi yang berbeda dari setiap institusi terkait.

Efektifnya sebuah program tentu saja berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana maupun stakeholders terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, tujuan yang ingin dicapai serta upaya monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi ini berada pada klasifikasi sedang yang berarti bahwa prosedur penggunaan maupun pengoperasian IPAL pabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung belum dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa sekalipun banyak pabrik yang telah memiliki IPAL namun lebih dari 60% perusahaan membuang limbah langsung ke sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan dan pengoperasian IPAL tidak dipatuhi oleh para pengusaha tersebut. Hal ini terjadi di kawasan Majalaya, Rancaekek dan Solokan Jeruk sehingga daerah hulu sungai Citarum dan sungai Cimande dan Cikijing yaitu anak sungai Citarum yang telah terkontaminasi dengan parah. Air sungai selama 24 jam berwarna warni dengan kandungan racun yang berbahaya. Begitu pula yang terjadi di daerah Cisirung Dayeuhkolot.

Mengingat parahnya akibat yang ditimbulkan dari pembuangan limbah pabrik bagi masyarakat, penanganan limbah pabrik tekstil di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sejak tahun 2011 ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup

(KLH). Studi lapangan yang dilakukan KLH mengkaji dan menghitung data valid dampak limbah pada masyarakat telah dilakukan secara intensif menemukan titik temu kesepakatan (mediasi) antara masyarakat Rancaekek dan perusahaan. Jika setelah mediasi tak menemukan titik temu, sanksi lebih tegas bisa diberikan kepada perusahaan tekstil yang membuang limbah tanpa prosedur. Sanksi yang diberikan bisa bentuk pidana bahkan pencabutan izin usaha.

Namun demikian terdapat beberapa pertimbangan yang hingga kini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah, sekalipun masalah limbah di kawasan industri bukan masalah baru dan penanganannya cenderung berlarut-larut. Menurut salah seorang pejabat BPLH, masalah ini seperti lingkaran setan. Setidaknya ada 35.000 orang menggantungkan hidup sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan tekstil ini yang menyebabkan penanganan lewat jalur hukum menjadi sangat sulit. Kondisi eksisting hingga saat ini setidaknya 450 hektar sawah tercemar dan tidak bisa ditanami lagi. Kerusakan sudah sangat parah. Data pada BPLHD Jabar menunjukkan sepanjang 1993 hingga 2008 tercatat 20 laporan resmi dari masyarakat yang menjadi agenda penyelesaian diantaranya dengan PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Star dalam mengatasi limbah tekstil. Penyelesaiannya ditempuh dengan *alternative dispute resolution (ADR)* ber Nomor 660.3/631/I/2002 tanggal 6 Agustus 2002 yang berisikan beberapa tindakan untuk jangka pendek dan panjang.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui

konsesus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung.

Hasil pengujian hipotesis melalui perhitungan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koordinasi melalui kewenangan, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi dengan institusi lain yang belum optimal menyebabkan belum efektifnya penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung.

Pengaruh yang kuat antara variabel koordinasi dengan efektivitas penertiban IPAL di Kabupaten Bandung serta pengaruh yang signifikan antara kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada konsep efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung tidak terlepas kaitannya dengan koordinasi dalam mengelola perilaku tugas dan hubungan antar institusi maupun dengan para pelaku industri di kawasan tersebut. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar dari variabel lain selain variabel koordinasi yang turut mempengaruhi terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung.

Saran

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung, dapat peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPAL di wilayah timur Kabupaten Bandung, dapat

peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya BPLHD Kabupaten Bandung dapat menggunakan wewenang untuk melakukan kerjasama dengan institusi lain yang terkait dalam pelaksanaan penertiban IPAL
2. Hendaknya BPLHD Kabupaten Bandung dapat meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antar instansi yang berwenang dengan memadukan program program yang selaras dalam pelaksanaan penertiban IPAL;
3. Meningkatkan pemanfaatan forum pertemuan yang dilakukan membahas setiap permasalahan yang timbul dalam dan melakukan pengambilan keputusan bersama dalam menangani masalah penertiban IPAL;
4. Hendaknya setiap institusi yang terkait dapat menghilangkan persepsi perkotak-kotakan tindakan sikap sehingga dapat dilakukan tindakan yang sama dalam menangani masalah penertiban IPAL.
5. Hendaknya BPLHD dapat mengambil sikap tegas dalam menindak para pengusaha yang melakukan kecurangan dalam pengoperasian IPAL.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (terjemahan Samodra Gibson et al, 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Guilford, James P. 1994. *Fundamental Statistics in psychology and Education*. New York: Mc Graw Hill Book Company
- Handayani, Soewono, 1996. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2001.

- Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.
- 2007. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kerlinger, F. N. 1998. *Azas-azas Penelitian Behovioral* (terjemahan) Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ruseffendi, ET.1994. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non Eksakta,* Semarang:IKIP Semarang Press.
- Saefudin, Azwar, 1997. *Reabilitas dan Validitas.* Yogyakarta:PustakaPelajar
- Sevilla, Consvelo,G.,et.all. 1993. *Pengantar Metode penelitian.*** Penerjemah :Alimudah Tuwu : SKS : PNI Universitas Indonesia.
- Siagian, Sondang, 1988. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa,* Bandung: Alumni.
-1995. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa,* Bandung: Alumni.
- , 1996. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional,* Jakarta: Gunung Agung.
- Steers M, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta : Erlangga.
- Stoner,James A.F Freeman, R Edward. 1996. *Manajemen Jilid I & II, alih bahasa Alexander Sindoro.* Jakarta : PT Prenhallindo.
- Sugandha. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak administrasi.* Jakarta: Pradaya.
- Sugiyono, 2003,. *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfa Beta.
-, 2004,. *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfa Beta
-, 2005,. *Metodologi Penelitian Administrasi* Bandung: Alfa Beta
-, 2006,. *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfa Beta
-, 2008,. *Metodologi Penelitian Administrasi,* Bandung: Alfa Beta
- Sukarno, K, 1996. *Dasar-dasar Manajemen.* Jakarta:CV Talaga Bening.
- Syarifudin,Ateng, 1993, *Pengantar Koordinasi Pemerintahan Daerah.* Tarsito:Bandung.

B. Dokumen dan Sumber Lain

- Indonesia, Republik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah,* Bandung:Fokusmedia
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.*
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 *tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 *tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung*